

Dampak Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau

Aditya Pratama¹, Anggatia Ariza²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

E-mail: djadititya96@gmail.com¹, anggatia_ariza@yahoo.co.id²

Article History:

Received: 29 Juni 2024

Revised: 09 Juli 2024

Accepted: 14 Juli 2024

Keywords: *Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan IPM*

Abstract: *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat yang diperlukan untuk mengklasifikasikan negara dan mengukur tingkat kesejahteraan. IPM juga dapat menentukan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum pada IPM di Kabupaten Sekadau dari tahun 2016 hingga 2022 secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series yang diproses melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berdampak positif namun tidak signifikan terhadap IPM di Kabupaten Sekadau, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum sangat mempengaruhi IPM di Kabupaten Sekadau. Kemudian secara simultan variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan terkait belanja daerah yang memberikan pengaruh positif bagi IPM, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan.*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Keberadaan SDA menjadi modal penting dalam pembangunan, namun kemakmuran tidak akan tercapai jika SDM tidak mampu memanfaatkannya secara optimal. Kemakmuran serta keberhasilan pembangunan akan tercapai jika SDM mampu mengelola SDA secara optimal dengan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa SDM berperan penting dalam menghasilkan kemakmuran sebuah wilayah. Sumber daya manusia berfungsi sebagai subjek dan objek pembangunan. (Tyas & Ikhsani, 2015)

Penyusunan dan penerapan kebijakan terkait pembangunan sebaiknya mempertimbangkan SDM sebagai subjek dan objek pembangunan. Permasalahan SDM dapat

ditemui di bidang pemerintahan dan kehidupan seperti ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Permasalahan SDM dalam kuantitas yang banyak adalah ketersediaan sandang, pangan, dan papan, sedangkan kualitas SDM akan berdampak pada kemampuan daya saing. (Kustanto, Sholihah, & Utami, 2020)

IPM menggabungkan aspek penting dalam pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli atau pendapatan perkapita. Keberhasilan pembangunan manusia akan tercermin pada kualitas tenaga kerja atau SDM. SDM yang berkualitas akan mampu untuk mengelola SDA yang tersedia, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, SDM merupakan pelaku proses dan modal dalam pembangunan. IPM memainkan peran penting dalam proses pembangunan ekonomi serta menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia. (Adelfina & Jember, 2016; Asnidar, 2018)

Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kabupaten/Kota. Selama tujuh tahun terakhir, IPM Kabupaten Sekadau lebih rendah dibandingkan dengan IPM rata-rata Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Sekadau secara rata-rata masih di bawah pembangunan manusia di Kalimantan Barat secara keseluruhan. Namun demikian, IPM Kabupaten Sekadau pada tahun 2016-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 64,12.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi IPM. Belanja modal sebagai variabel independen (X_1) mempengaruhi IPM karena belanja modal berupa pembelian aset tetap yang diperuntukan pelayanan publik, seperti tanah, bangunan, mesin, jalan, dan jaringan irigasi dapat meningkatkan IPM. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen (X_2) berdampak pada IPM, karena menunjukkan adanya perubahan output dan pendapatan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan daya beli dan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga kesejahteraan meningkat. (Ariza, 2016). Upah minimum sebagai variabel independen (X_3) mempengaruhi IPM karena merupakan salah satu indikator dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan standar kehidupan yang layak sehingga memberikan efek positif bagi IPM. Jika masyarakat memperoleh upah yang dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, maka masyarakat dapat menjaga kesehatan serta memperoleh pendidikan yang memadai. Hal ini dapat menjaga ketercapaian keberlangsungan hidup layak (Mahihody, Engka, & Luntungan, 2018).

Berikut rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas: 1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Sekadau tahun 2016–2022? 2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Sekadau tahun 2016–2022? 3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Sekadau tahun 2016–2022? 4. Apakah belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum berpengaruh secara simultan terhadap IPM di Kabupaten Sekadau tahun 2016-2022?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian tentang pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). (Yusuf, 2014). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum sedangkan variabel terikat adalah IPM. Belanja modal adalah belanja pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Belanja ini juga dikenal sebagai belanja pembangunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal Kabupaten Sekadau Tahun 2016–2022 sebagai variabel X_1 . Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau dari tahun 2016-2022 digunakan sebagai variabel X_2 dalam penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai nilai untuk mengukur

perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah. Upah Minimum Kabupaten Sekadau Tahun 2016–2022 digunakan sebagai variabel X_3 dalam penelitian ini.

Upah minimum adalah upah terendah yang digunakan oleh pemberi kerja sebagai standar untuk menentukan upah bagi pekerja. IPM merupakan nilai rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. IPM Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2022 digunakan sebagai variabel Y dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi variabel dependen dan independen. Uji ini dapat dilakukan dengan Uji Kolomogrov-Smirnov, jika nilai signifikansi lebih dari 5% maka data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimator OLS menghasilkan *Lineier Unbiased Estimator* (LUE) sehingga dapat menyebabkan perhitungan standa error dan uji hipotesis tidak dapat dipercaya (Widarjono, 2013). Uji *glejser* digunakan dalam penelitian ini, jika nilai signifikansi lebih dari 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan keberadaan korelasi antara residual pada periode t dan residual pada periode t-1 dalam model regresi linear. Uji Runs adalah salah satu cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi (Ghozali, 2018).

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui korelasi antara variabel independen. Nilai VIF dan nilai toleransi dapat digunakan untuk mengetahui multikolinieritas. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinieritas.(Widarjono, 2013)

2. Uji Hipotesis

a. Uji t Statistik

Untuk menentukan pengaruh parsial antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen. Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%.

b. Uji F Statistik

Untuk menentukan pengaruh simultan antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen. Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%.

3. Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = IPM

X_1 = Belanja Modal

X_2 = Pertumbuhan Ekonomi

X_3 = Upah Minimum

ε = *Random error*

4. Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan SDM meliputi peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Investasi dalam pembangunan SDM harus dilakukan sejak awal dan berlangsung terus menerus. (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018)

IPM terdiri dari nilai rata-rata dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk menunjukkan kondisi penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan kata lain, IPM digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Data IPM di Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Sumber: BPS Prov Kalbar

Gambar 1. IPM Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2022

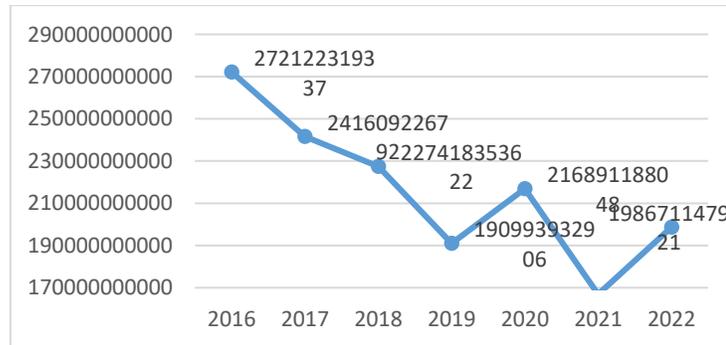
Berdasarkan gambar 1 di atas terlihat bahwa IPM di Kabupaten Sekadau relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir IPM di Kabupaten Sekadau rata-rata berada pada angka 64,12 persen yang berarti IPM Kabupaten Sekadau termasuk kedalam kategori IPM sedang. IPM dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 62,52 persen. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun terendah ini disebabkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM). Adapun permasalahan-permasalahan yang menghambat capaian pembangunan kesehatan adalah dikarenakan masih sulitnya untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan yang ada di beberapa daerah atau wilayah di beberapa kecamatan yang akses jalannya masih sulit, mulai dari jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang, sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang ada disebagian besar fasilitas kesehatan yang tidak lengkap seperti puskesmas dan rumah sakit di daerah. Selain itu, penyebab lainnya yang membuat angka IPM rendah ditahun ini adalah karena menurunnya capaian pada komponen-komponen dari pembentuk IPM itu sendiri dari tahun sebelumnya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir sebesar 70,94 persen, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,34 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,56 persen (BPS Kabupaten Sekadau, 2023).

Sementara itu, untuk Indeks Pembangunan Manusia dengan angka tertinggi di Kabupaten Sekadau selama periode 2016-2022 adalah pada tahun 2022 sebesar 65,58 persen. IPM yang terjadi pada tahun tertinggi ini didukung oleh membaiknya indikator-

indikator pembangunan dari semua aspek, mulai dari pelayanan publik, tata kelola ekonomi dan sebagainya (BPS Kabupaten Sekadau, 2023)

2. Belanja Modal

Data belanja modal bersumber dari BPKAD Kabupaten Sekadau. Untuk melihat perkembangan belanja modal di Kabupaten Sekadau, dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:

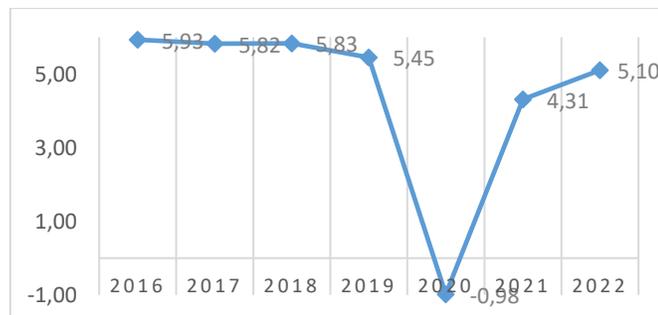


Gambar 2. Belanja Modal Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2022

Berdasarkan gambar 2 diatas bahwa belanja modal di Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu 2016-2022 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2016-2022 rata-rata belanja modal di Kabupaten Sekadau adalah sebesar Rp216.368.684.846,00. Angka ini mencerminkan bahwa penyerapan realisasi anggaran di Kabupaten Sekadau tergolong kedalam tingkat rendah. Belanja modal dengan angka terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp166.874.625.298,00. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam APBD terlihat penyerapan untuk belanja modal tergolong rendah. Sementara itu, belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp272.122.319.337,00. Strategi pengalokasian belanja daerah sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Alokasi belanja modal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan daerah. Pemerintah daerah membelanjakan uang untuk proyek-proyek modal seperti membangun dan memperbaiki fasilitas umum sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Handayani & Woyanti, 2021).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau, dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini:

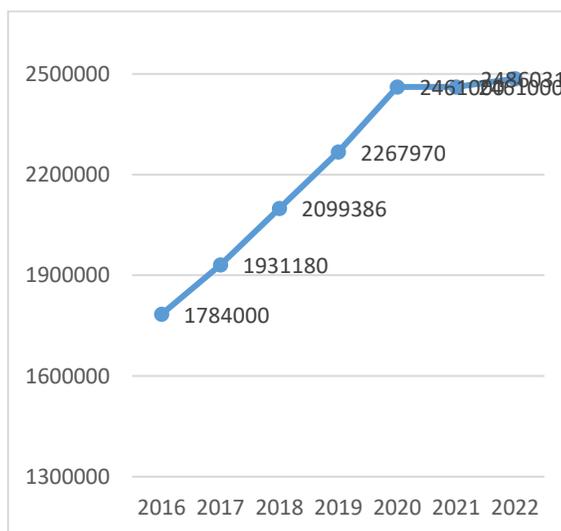


Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2022

Berdasarkan gambar 3 diatas bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu 2016-2022 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2016-2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau adalah sebesar 4,77 persen. Pertumbuhan ekonomi dengan angka terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,98 persen. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda diseluruh dunia oleh karena itu menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam mekanisme pasar, harga bergerak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih banyak daripada penawaran maka harga akan menjadi lebih tinggi. Kabupaten Sekadau memiliki sektor produksi kelapa sawit sebagai penyumbang terbesar PDRB, perlambatan output industri akan menurunkan permintaan terhadap bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi kelapa sawit. Sementara harga karet dan sawit turun sehingga pabrik ditutup. Implikasinya harus mengantisipasi permintaan yang berkurang yang akan menimbulkan resiko penurunan harga. Harga barang konsumsi juga akan meningkat jika pasokan lokal tidak tersedia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 5,93% di tahun 2016.

4. Upah Minimum

Perkembangan tingkat upah minimum di Kabupaten Sekadau, dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4. Upah Minimum Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2022

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa upah minimum di Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan pada periode tahun 2016 hingga 2022. Rata-rata upah minimum adalah sebesar Rp2.212.938,00 dari tahun 2016 hingga 2022, dengan upah minimum terendah sebesar Rp1.784.000,00 di tahun 2016, dan upah minimum tertinggi sebesar Rp2.486.031,00 di tahun 2022. Dengan adanya peningkatan upah minimum dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	7
Normal Parameters ^{a,b} Mean	,0000000
Std. Deviation	,00361876
Test Statistic	,173
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Tabel 1 menunjukkan Nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,200. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka data yang digunakan telah berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui keberagaman variasi residual untuk setiap pengamatan. Penelitian ini menggunakan uji glejser, yang menentukan bahwa tidak ada heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% . Tabel 2 di bawah ini menunjukkan output uji glejser:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients

Model	Sig
1 (Constant)	,380
Belanja Modal	,277
Pertumbuhan Ekonomi	,239
Upah Minimum	,594

a. Dependent Variable: Abs_RES

Tabel 2 menunjukkan nilai signifikan Belanja Modal sebesar 0,277, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,239, dan Upah Minimum sebesar 0,594. Nilai signifikansi semua variabel bebas lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Runs Test adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah ada autokorelasi atau tidak. Hasil uji autokorelasi untuk penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00034
Asymp. Sig. (2-tailed)	,952

Tabel 3 menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,952. Karena nilai ini lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara variabel bebas. Nilai toleransi dan VIF digunakan untuk menguji multikolinearitas. Tabel 4 di bawah menunjukkan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficient

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Belanja Modal	,155	6,468
Pertumbuhan Ekonomi	,410	2,437
Upah Minimum	,117	8,543

a. Dependent Variable: IPM

Tabel 4 di atas menunjukkan semua variabel memiliki Nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, artinya tidak ada masalah multikolinearitas dalam data yang digunakan.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menentukan pengaruh parsial variabel dependent terhadap variabel independen. Hasil Uji t ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 5. Hasil Uji t-Signifikan

Coefficients

Model	Sig.
(Constant)	,621
Belanja Modal	,344
Pertumbuhan Ekonomi	,037
Upah Minimum	,037

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel 5 diatas, dapat diketahui:

- 1) Variabel belanja modal dengan nilai Sig. Sebesar 0,344 menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.
- 2) Variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig. Sebesar 0,037 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM.
- 3) Variabel belanja upah minimum dengan nilai Sig. Sebesar 0,037 menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F mengevaluasi pengaruh semua variabel bebas, yaitu belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara simultan terhadap variabel terikat yaitu IPM. Tabel 6 berikut menunjukkan hasil uji F.

Tabel 6. Hasil Uji F-Signifikan
Anova

Model	F	Sig.
Regression	17,909	,020 ^b
Residual		
Total		

Berdasarkan tabel 6 diatas, dengan nilai Sig. 0,020, maka secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

7. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi model (model regresi) pada penelitian ini adalah:

$$Y = 0,820 + 0,037 X_1 + 0,005 X_2 + 0,162 X_3 + \varepsilon$$

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	,820	1,493
Belanja Modal	,037	,033
Pertumbuhan Ekonomi	,005	,005
Upah Minimum	,162	,045

Interpretasi dari masing-masing variabel penelitian berdasarkan hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Konstanta (β_0) adalah sebesar 0,820, yang memberikan arti bahwa IPM adalah sebesar 0,820 jika variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum adalah konstan atau sama dengan nol.
- Koefisien regresi untuk variabel belanja modal (β_1) sebesar 0,037 yang artinya apabila belanja modal meningkat 1 persen maka IPM akan meningkat sebesar 0,037 persen.
- Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi (β_2) adalah 0,005 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi bertambah 1 persen maka IPM akan meningkat sebesar 0,005 persen.
- Koefisien regresi variabel upah minimum (β_3) adalah 0,162, yang berarti bahwa jika upah minimum meningkat sebesar 1 persen, maka IPM akan meningkat sebesar 0,162 persen.

8. Uji Koefisien Determinasi

Tujuan dari uji koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,973 ^a	,974	,894	,01509

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,894, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 8 di atas. Hal ini berarti IPM Kabupaten Sekadau, mampu dijelaskan oleh belanja modal (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2), dan upah minimum (X_3) sebesar 89,4%. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 10,6%.

a. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dengan nilai t-statistik 1,121 dan nilai sig. 0,344, menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Nilai koefisien sebesar 0,037 menunjukkan arah positif yang berarti bahwa peningkatan belanja modal akan diikuti dengan peningkatan IPM (Ariza, 2016; Setiawan & Budiana, 2015; Tarumingkeng, Rimate, & Rotinsulu, 2018)

Penelitian ini menemukan bahwa IPM di wilayah Kabupaten Sekadau masih berada pada kategori sedang, tetapi capaian IPM terus meningkat secara bertahap setiap tahun. Pola belanja modal cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2022. Penurunan belanja modal ini dapat berdampak pada penurunan ketersediaan layanan publik, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang sangat penting untuk mencapai peningkatan pembangunan manusia. Belanja modal membentuk investasi jangka panjang, sehingga memerlukan pengamatan yang lebih lama agar dapat diketahui manfaatnya karena manfaatnya tidak dapat dirasakan saat ini. Alokasi Belanja Modal dapat berdampak positif dalam jangka panjang. (Indramawan, 2018)

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,005, t-statistik 1,046, dan nilai sig. 0,037, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap IPM dengan arah positif. Dengan kata lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan IPM.

Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi antara tahun 2016 dan 2022 namun disertai dengan peningkatan nilai IPM setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang akhirnya akan menyebabkan kesejahteraan meningkat (Ariza, 2016). Selain itu, pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi) (Komariah, Yogiartoro, & Hukum, 2019). Hasil ini juga sesuai dengan penyampaian UNDP bahwa perbaikan kualitas pembangunan manusia dapat terjadi secara efektif dan mengalami peningkatan apabila didukung oleh PDRB yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (Hadinata, Valeriani, & Suhartono, 2020)

c. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan arah positif, dengan nilai koefisien 0,162, t-statistik 3,583, dan nilai sig. 0,037. Hal ini sesuai dengan adanya peningkatan upah minimum dan IPM dari tahun 2016 hingga 2022.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari penghasilan yang diperoleh termasuk upah. Peningkatan upah minimum dari kategori *lower medium* akan mendukung untuk memiliki kehidupan yang layak, dan meningkatkan standar hidup. Pemerintah sangat berperan dalam menetapkan kebijakan terkait upah minimum, salah satunya adalah dalam bentuk peraturan. Peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1 yaitu bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas pengupahan yang layak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai jaring pengaman sosial untuk mencegah penurunan upah dan mengurangi ketimpangan ekonomi, ditetapkan upah minimum. Pekerja harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga, dengan upah minimum.

Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kualitas hidup yang akhirnya meningkatkan nilai IPM (Faizin, 2021). Peningkatan upah minimum akan meningkatkan daya beli sehingga berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia (Herman, 2018)

d. Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan nilai F-statistik sebesar 17,909 dengan nilai sig. sebesar 0,020, menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja modal yang mempengaruhi IPM secara positif menunjukkan bahwa pemerintah membelanjakan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memenuhi kebutuhan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.(Ariza, 2016). Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat meningkatkan daya beli individu seiring dengan peningkatan hasil pendapatan per kapita dan perubahan pola penggunaan. IPM akan meningkat akibat daya beli masyarakat yang tinggi (Khikmah, Sarfiah, & Prasetyanto, 2018). Kesejahteraan rakyat juga akan meningkat sebagai akibat dari kenaikan upah minimum yang akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia secara keseluruhan (Gunawan, Yarsah, & Arsyah, 2022).Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan belanja modal dioptimalkan.

KESIMPULAN

1. Belanja modal tidak mempengaruhi IPM Kabupaten Sekadau secara signifikan pada tahun 2016–2022 namun memiliki arah positif
2. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi IPM Kabupaten Sekadau tahun 2016–2022 secara signifikan dan positif.
3. Upah minimum mempengaruhi IPM Kabupaten Sekadau tahun 2016–2022 secara signifikan dan positif.

4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau tahun 2016–2022 dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum. Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang dampak berdampak pada IPM, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional untuk peningkatan kesehatan. Pemberian Beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk peningkatan di bidang pendidikan, maupun program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kemampuan daya beli. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dapat menerapkan strategi peningkatan alokasi belanja modal.

DAFTAR REFERENSI

- Adelfina, & Jember, I. M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.*, 5 (10), 1011–1025.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Ariza, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perpektif Islam. *Almaslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 1–21.
- Asnidar, A. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.1234/jse.v2i1.781>
- BPS Kabupaten Sekadau. (2023). *Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2023*. BPS Kabupaten Sekadau.
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, R., Yarsah, W. N., & Arsyah, T. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Sumatra. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 125–142.
- Hadinata, E., Valeriani, D., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Sorot*, 15(1), 43. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.43-53>
- Handayani, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Modal Terhadap IPM DI 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 4(2), 17–26. Retrieved from <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/biceser/article/view/242/194>
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). *Eko Dan Bisnis (Riau Economics and Business Reviewe)*, 9(1), 20–24.
- Indramawan, D. (2018). The Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1247–1272.

- Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/261>
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2018). Pengaruh Kemiskinan, pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018. *DINAMIC: Directory Journal OfEconomic*, 2(4), 1127–1142.
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Kustanto, M., Sholihah, F., & Utami, M. (2020). Tantangan Pengembangan Rumah Data Kependudukan Di Kabupaten Sidoarjo. *Borneo Akcaya*, 6(1), 58–73.
- Mahihody, A. Y., Engka, D. S. M., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 24–34.
- Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10).
- Tarumingkeng, W. A., Rumate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82–95.
- Tyas, A. A. W. P., & Ikhsani, K. T. W. (2015). Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah Indonesia*, 12(1), 1–15.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.